

Integrasi Eropa dan Konsep Negara-Bangsa: Perbedaan Pengalaman Historis Prancis, Inggris, dan Jerman

NASRULLOH RIYANO

Alumnus Program Studi Kajian Wilayah Eropa Pps Universitas Indonesia

Abstract

In the historical evolution of relationship between the state as instrument of authority and its subjects, there is no formulation more widely -or even globally - accepted other than nation-state. This article will explore the legacies and the influences of nation-state conception – along with its historical development and its national variants - within the European integration process, to see whether the integration process has become another step in the evolution of statehood thinking or only another specimen to nation-state model.

Keywords: European integration, nation-state, evolution of statehood

Secara historis konsep negara-bangsa baru hadir setelah terjadi pergeseran *locus* kepemilikan kedaulatan, dari raja ke tangan rakyat (*popular sovereignty*) pada Revolusi Prancis 1789. Revolusi ini menandai lahirnya konsep bahwa satuan-satuan politik negara haruslah kongruen dengan konstituennya (*le citoyen*)¹.

Bentuk negara-bangsa yang kita kenal sekarang dapat dikatakan merupakan sebuah kritik bagi sistem imperium

of Nations and Regions”, dalam Richard Sakwa dan Anne Stevens, *Contemporary Europe* (New York: Palgrave Foundation, 2000), hal. 49. Bagi rakyat Prancis pada era revolusi, pengertian bangsa atau *la nation* lebih dekat dengan pengertian warga negara atau *le citoyen*, dan keanggotaan dari *la nation* didefinisikan dari tempat tinggal dan *act of political will*, dan bukan semata berdasar etnis atau bahasa.

¹ Brian Jenkins mengutip Jean-Lambert Tallien “*the only foreigners in France are the bad citizens*”, Brian Jenkins, “The Europe

dan sampai saat ini kita melihat belum ada bentuk sistem lain yang memiliki potensi untuk dapat menggantikan sistem negara-bangsa. Lebih jauh, kita bisa melihat bahwa institusi Uni Eropa sendiri dibangun di atas proposisi-proposisi konsep negara-bangsa. Berdasarkan ini, Uni Eropa pada prinsipnya juga merupakan sebuah negara-bangsa dalam skala regional. Dengan demikian, institusi Uni Eropa dapat dikatakan menjadi wadah bagi agregasi individu-individu masyarakat Eropa.

Salah satu proposisi negara-bangsa adalah adanya bangsa sebagai elemen negara-bangsa. Karenanya, negara harus membuat atau membangun sebuah identitas kebangsaan, terutama jika negara tersebut memiliki komposisi multibangsa. Di sini proses pembentukan identitas kebangsaan sebagai syarat definitif konstituen negara-bangsa menjadi dasar bagi pembentukan identitas warga negara Uni Eropa sebagai syarat definitif konstituen Uni Eropa. Proses pembentukan identitas sosial masyarakat Eropa dalam hal ini adalah bentuk lain dari proses *nation-building*. Proses *nation-building* sendiri dikatakan sebagai sebuah proses politik yang tidak pernah selesai, karena terus ada kebutuhan negara untuk memperbarui kontrak sosialnya dengan konstituen. Dengan demikian, masya-

rakat Eropa menjadi subyek dari dua proses *nation-building* secara simultan yang dilakukan masing-masing institusi negara dan Uni Eropa.

Jika proses ini kita pertentangkan, maka kita akan melihat sebuah pola tarik-menarik konstituen yang tidak berbeda dengan yang terjadi secara domestik dalam perebutan suara oleh partai-partai politik. Tetapi antara Uni Eropa dan negara tidak terdapat hubungan konflik seperti itu. Hal ini disebabkan dua hal: Uni Eropa sendiri mendapat sumber daya politik dari negara-bangsa, dan Uni Eropa sebagai obyek yang secara historis masih baru harus melakukan penjangkaran pada identitas nasional negara-bangsa yang lebih mapan. Jika individu menganggap proyek *nation-building* yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai bertentangan atau mengancam identitas dan kontrak yang sebelumnya telah dibangun dengan negara-bangsa, maka pembentukan identitas sosial konstituen Uni Eropa juga akan terancam gagal.

Strategi yang diambil oleh Uni Eropa antara lain dengan memposisikan diri sebagai sumber identitas yang bersifat komplementer dengan identitas nasional negara bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 (1) dari Traktat Maastricht yang berbunyi: "*Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding*

the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall complement and not replace national citizenship."². Namun di pihak lain, negara-bangsa juga memiliki perangkat identitas nasional, dan konsep yang bisa jadi berbeda antara negara satu dengan negara lain, termasuk juga berbeda dengan konsep yang dimiliki dan ditawarkan oleh Uni Eropa. Ketika kompromi dalam hal ini gagal dicapai, besar kemungkinan bahwa Uni Eropa akan gagal dalam proyek membangun konstituen definitif. Perbedaan-perbedaan dasar antara tiga negara besar di Eropa³

mengenai konsep 'Eropa' memainkan peran penting dalam perjalanan perkembangan institusi Uni Eropa karena selain merupakan agregasi individu, Uni Eropa juga merupakan agregasi dari institusi-institusi negara-bangsa yang menjadi anggotanya. Ini menjadikan pengamatan terhadap dinamika negara-bangsa sebagai obyek identifikasi yang ingin dilebur oleh Uni Eropa menjadi penting.

Bagian berikut akan memberi gambaran singkat mengenai bagaimana perbedaan pengalaman *nation-building* antara tiga negara besar yang dibahas dapat berpengaruh pada dinamika pembentukan identitas sosial masyarakat Eropa dalam kerangka Uni Eropa.

Konsepsi Prancis tentang Eropa

Dalam konsepsinya tentang Eropa, Prancis setuju dengan bentuk *supra-state*, yang didasarkan pada budaya Eropa Barat⁴. Di sini kita bisa menemukan pola *nation-building* dalam budaya politik Prancis yang didasarkan pada metode akulturasi dan asimilasi. Terdapat satu perbedaan penting dalam budaya politik

² Teks Maastricht Treaty didownload dari <http://www.eurotreaties.com/maastrichttext/maastrichtec.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2004, pukul 03.15 WIB

³ 'Negara besar' yang dimaksud disini adalah negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki *power* dan pengaruh relatif lebih tinggi dari negara-negara anggota lain dalam menentukan arah kebijakan Uni Eropa. Secara khusus istilah negara-negara besar dalam tulisan ini akan mengacu pada tiga negara yang dianggap mewakili pemikiran atau pendekatan mengenai arah perkembangan institusi Uni Eropa, yaitu Inggris, Prancis dan Jerman. Dalam pembahasan ini juga istilah negara juga digunakan sebagai bentuk personifikasi dari agregasi kelompok individu yang menjadi warganegara, meskipun ada kecenderungan besar bahwa kebijakan negara lebih banyak ditentukan oleh para elit politik daripada opini mayoritas warga-negara yang awam.

⁴ Christopher Brewin, "European Identity", dalam Joe Andrew, Malcolm Crook dan Michael Waller (ed.), *Why Europe? Problems of Culture and Identity, Volume 1: Political and Historical Dimensions* (London: MacMillan Press Ltd., 2000), hal. 70.

Prancis yang perlu diingat, yaitu antara *l'État* dan *la nation*⁵. Kecenderungan pada negara (*l'État*) yang kuat dengan sistem pemerintahan tersentralisasi menyebabkan perbedaan dan ketidaksesuaian dengan beberapa sistem kenegaraan negara Eropa lain, seperti Jerman yang memiliki tradisi federal. Prancis memiliki sejarah panjang berkaitan dengan bentuk negara kesatuan yang kuat. Rakyat Prancis membutuhkan institusi negara dan figur pemimpin yang kuat untuk mencegah terjadinya proses disintegrasi sosial⁶. Definisi

masyarakat Prancis mengenai bangsa juga dapat dikatakan berbeda dengan definisi 'bangsa-etnik' yang dimiliki oleh Jerman. Bagi rakyat Prancis, pengertian bangsa atau *la nation* lebih dekat dengan pengertian warga negara atau *le citoyen*. Ini adalah warisan dari paham Jacobin yang muncul pada era Revolusi⁷. Faktor lainnya yang membentuk kultur politik Prancis adalah mitos tentang kebesaran Prancis sebagai sebuah bangsa yang berpengaruh di dunia. Mitos tentang *grandeur* ini menyebabkan Prancis terus berambisi untuk menjadi sebuah kekuatan utama, terutama di Eropa. Konsep yang inheren tentang Prancis yang besar dan berbudaya melahirkan anggapan bahwa Prancis memiliki sebuah 'tugas' untuk mengajari dunia tentang budaya dan peradaban. Hal ini terlihat dari bagaimana Prancis memperlakukan wilayah-wilayah jajahannya dengan kebijakan asimilasi dan menjadikan mereka 'Prancis'.

Faktor kultural lain yang mempengaruhi Prancis dalam integrasi Eropa adalah bahasa. Bahasa Prancis sebagai simbol identitas dan kebangsaan pernah menjadi bahasa pengantar dalam hubungan antar-

⁵ Amy G. Mazur dan Andrew Appleton, "France at the Crossroads: An End to French Exceptionalism?", dalam Howard J. Wiarda (ed.), *European Politics in the Age of Globalization* (Orlando: Harcourt College Publishers, 2001), hal. 97.

⁶ Brian Jenkins dan Nigel Copsey, "Nation, Nationalism and National Identity in France", dalam Brian Jenkins dan Spyros A. Sofos (ed.), *Nation & Identity in Contemporary Europe* (London: Routledge, 1996), hal. 101-102. Prancis memiliki tradisi kenegaraan yang kuat, dan tradisi ini yang kemudian membentuk rasa kebangsaan dalam diri masyarakat Prancis. Bangsa Prancis memiliki sejarah kenegaraan yang kuat. Prancis adalah negara pertama dalam sejarah, yang memindahkan kedaulatan dari tangan kaum monarki pada rakyat jelata. Namun tradisi kenegaraan Prancis yang lebih kuat daripada rasa solidaritas kebangsaan ini kemudian menurunkan juga tradisi otoriter. Bangsa Prancis lebih suka dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, seperti Napoleon atau Charles deGaulle.

⁷ Brian Jenkins, "The Europe of Nations and Regions", dalam Sakwa dan Stevens, *op. cit.*, hal. 49.

negara di Eropa⁸. Lenyapnya pengaruh bahasa Prancis dan digantikan dengan bahasa Inggris kemudian mempengaruhi sikap Prancis dalam Uni Eropa. Tuntutan Prancis agar setiap keputusan Uni Eropa ditulis dalam bahasa Prancis adalah tanda dari ambisi Prancis untuk mengembalikan posisi penting yang pernah dicapai oleh bahasa Prancis sebagai *lingua franca* hubungan antarnegara.

Inggris dan Eropa

Inggris adalah negara yang paling ambigu dalam menyikapi isu integrasi Eropa. Di satu sisi Inggris merasa dirinya terpisah dari Eropa, baik dilihat dari identitasnya maupun geografinya. Namun di sisi lain, Inggris juga tidak dapat menyangkal bahwa Eropa adalah tetangga terdekatnya, dan dalam hal ini Eropa memiliki signifikansi besar bagi keberadaan Inggris sendiri. Ambiguitas sikap Inggris ini sedikit banyak memberi pengaruh pada integrasi mendalam Eropa, dan juga sebaliknya bagaimana Inggris memberi respon

terhadap perubahan di benua tersebut. Faktor terpenting yang menjadi kesulitan Inggris adalah bagaimana Inggris mendefinisikan diri (*self*) dan hubungannya dengan negara lain (*other*). Pandangan masyarakat tentang identitas nasionalnya adalah isu utama seputar perumusan kebijakan Inggris, terutama terhadap Eropa. Perumusan kepentingan nasional dan kebijakan pemerintah yang mengikutinya amat bergantung pada persepsi masyarakat dan definisi 'Britishness', serta nilai-nilai yang terkandung dalam kata itu⁹.

Gamble menyebutkan tiga hal penting berkenaan dengan bagaimana Inggris memandang dirinya sendiri dalam hubungan internasional, yakni bahwa Inggris adalah pionir, baik dalam kolonisasi, industri. Kerajaan Inggris Raya juga adalah pemimpin dalam perekonomian dunia, dan memiliki tanggung jawab untuk 'mengajari' dunia sesuai dengan pengalaman nasionalnya tersebut. Terakhir, secara institusional Inggris

⁸ Meskipun dalam hal bahasa ini, Prof. Marwati D. Poesponegoro menyatakan bangsa Prancis seperti melupakan bahwa nama bangsanya berasal dari nama suku 'Frank', sebuah suku yang berbahasa Jerman. Lihat Marwati Djoened Pesponegoro, *Sejarah Singkat Jerman*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982).

⁹ Konstruksi identitas 'British' dan nilai-nilai kultural didalamnya dapat dilihat dalam Junaidi, "The Year is 2000: What is It to Be British?", *Wacana*, Vol. 4 No. 1, (April 2002), hal. 54-66, dan Kenneth Lunn, "Reconsidering 'Britishness': The construction and significance of national identity in twentieth-century Britain", dalam Jenkins dan Sofos, *op.cit.*, hal. 83-99.

'selalu ada' dan tidak pernah mengalami keruntuhan institusi sebagaimana negara lain dalam kedua Perang Dunia¹⁰.

Ketika ide integrasi Eropa menjadi isu penting pasca Perang Dunia II, Inggris menghadapi setidaknya dua sisi peran internasional yang harus dikelola: hubungan dengan Amerika Serikat dan keterlibatan dalam masyarakat Eropa. Sebagaimana Churchill pernah menegaskan prioritas luar negeri Inggris pada de Gaulle bahwa sampai kapanpun Inggris akan selalu memilih lautan terbuka (hubungan transAtlantik) daripada daratan Eropa¹¹. Dengan demikian, terlihat bahwa Inggris lebih terikat pada Amerika ketimbang Eropa. Sikap ini diwarisi oleh para penerus Churchill di kemudian hari. Thatcher dalam kebijakan luar negerinya menganggap bangsa Amerika sebagai *honorary Englishmen*¹², sementara Thatcher memilih bersikap keras dan non-kompromis terhadap Eropa.

Penegasan Churchill ini menghasilkan dua kali veto Prancis atas permintaan Inggris untuk ikut serta dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, masing-masing pada 1962 dan 1968. Di pihak Inggris sendiri, *euroceptism* berkembang dalam masyarakat sebagai reaksi atas proses integrasi Eropa yang dianggap memberi ancaman terhadap identitas nasional dan kepentingan ekonomi Inggris. Sebuah jajak pendapat pada 1998 menunjukkan bahwa tidak kurang dari 40% masyarakat Inggris memandang bahwa Inggris sebaiknya meninggalkan Uni Eropa¹³.

Bagi masyarakat Inggris, Eropa dinilai terlalu didominasi oleh Prancis dan Jerman. Prancis dianggap mewakili simbol Katolikisme dan autokrasi¹⁴, sementara masyarakat Inggris merasa dirinya mewakili nilai-nilai demokrasi dan konstitusional. Di pihak lain, Jerman juga dianggap sebagai sebuah ancaman ekonomi dan 'barbar'. Di sini ingatan sejarah juga berperan dalam membentuk persepsi dan stereotip masyarakat Inggris terhadap kedua negara Eropa ini dan

¹⁰ Andrew Gamble, "Politics 2000", dalam Patrick Dunleavy dan Andrew Gamble et. al., *Developments in British Politics 5* (London: Macmillan, 1997), hal. 355-356.

¹¹ Stephen J. Lee, *Aspects of European History 1789-1980*, (London: Routledge, 1982) hal. 295.

¹² Eric J. Evans, *Thatcher and Thatcherism*, (London: Routledge, 1997), hal. 81.

¹³ Norman Davies, *The Isles: A History, 2nd Edition* (London: Macmillan, 2000), hal. 867.

¹⁴ Roger Eatwell, "Britain", dalam Roger Eatwell (ed), *European Political Culture: Conflict or Convergence?* (London: Routledge, 1997), hal. 52.

Eropa daratan pada umumnya. Perang Seratus Tahun antara Inggris dan Prancis dan keterlibatan Inggris dalam Perang Dunia Kedua, membantu membentuk stereotip dan konstruksi *self-other* dalam hubungan Inggris-Prancis-Jerman.

Faktor berikutnya adalah Persemakmuran. Inggris kehilangan sejumlah negara koloninya pada pertengahan abad ke-17. Secara ekonomi, ini membuat Inggris kehilangan jalur suplai bahan baku produksi dan pasar. Dilihat dari sisi politik, dekolonisasi adalah tanda menurunnya kekuatan Inggris sebagai negara yang pernah menguasai sepertiga dunia. Dengan motif ekonomi dan politik inilah Inggris bersama-sama negara bekas koloninya membentuk sistem ekonomi Persemakmuran dengan Inggris sebagai negara induk.

Dari sisi ekonomi, Persemakmuran adalah sebuah mekanisme tempat Inggris bergantung untuk menjaga keseimbangan kekuatan ekonominya dengan Eropa daratan. Inggris juga dengan demikian dapat menjaga citranya sebagai negara besar dalam politik internasional¹⁵. Hegemoni bahasa dan kultur, serta sistem

pendidikan Inggris terlihat jelas pada negara-negara anggota persemakmuran lainnya. Hal ini ternyata membawa beberapa masalah baru yaitu bahwa kewarganegaraan Persemakmuran dan imigrasi dari negara-negara bekas koloni Inggris menjadi ancaman bagi homogenitas masyarakat Inggris sendiri¹⁶. Dalam data tahun 1988 saja terdapat 51,6 juta Inggris berkulit putih, dari total 54,6 juta populasi negara pulau ini¹⁷. Selisih kurang lebih 3 juta warga Inggris imigran ini tentu cukup signifikan. Munculnya komunitas-komunitas yang berbudaya non-Eropa ini lalu menjadi pertanyaan dalam proses integrasi sosio-kultural Eropa.

Masalah kedua, Persemakmuran adalah sumber kekuatan (*power*) Inggris dalam politik Internasional. Apakah Inggris harus meninggalkan sekutu dan ikatan tradisionalnya untuk beralih pada Uni Eropa yang masih baru dan rentan konflik? Ketiga, Inggris menemukan bahwa perannya sebagai pemimpin negara-negara Persemakmuran memudar. Superioritas budaya Inggris menjadi per-

¹⁵ John Peterson, "Britain, Europe and the World," dalam Patrick Dunleavy dan Andrew Gamble (et. al.), *ibid*, hal. 36.

¹⁶ Martin O. Heisler dan Zig Layton-Henry, "Migration and the links between social and societal security", dalam Ole Wæver dan Barry Buzan (et. al.), *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe* (London: Pinter Publishers, 1993), hal. 160.

¹⁷ Heisler dan Layton-Henry, *ibid*, hal. 161.

tanyaan, ketika pada tiga pertemuan di Nassau, Vancouver dan Kuala Lumpur, Thatcher menemukan dirinya terisolasi dari negara-negara Persemakmuran lain, dalam membahas sanksi atas politik *apartheid* Afrika Selatan¹⁸.

Di antara negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II, perekonomian Inggris adalah yang paling sedikit mengalami kerusakan infrastruktur. Ini menjadi faktor pertama keengganan Inggris untuk terlibat dalam kerjasama ekonomi pada awal proses integrasi Eropa. Namun pada awal dekade 1960 Inggris yang kehilangan pasar koloninya, merasa bahwa ide pasar tunggal Eropa adalah sebuah jalan alternatif bagi perekonomian negara pulau tersebut. Inggris berusaha untuk masuk dalam kerjasama Eropa, meskipun melalui dua kali penolakan, sampai pada diterimanya Inggris sebagai anggota Masyarakat Eropa pada bulan Mei 1972.

Di sini kita melihat Inggris memiliki sebuah motif, yakni kebutuhan ekonomi. Namun dalam memenuhi kebutuhannya, Inggris harus mengorbankan antara lain kedaulatannya dan kebanggaan nasional sebagai negara yang pernah memiliki pengaruh besar. Pengor-

banan ini oleh masyarakat Inggris dinilai terlalu banyak, terlebih lagi ketika kedaulatan itu harus diserahkan pada sebuah institusi yang juga berisikan bekas musuh-musuh Inggris di masa lampau. Sebagai akibatnya, kebijakan Inggris terhadap Uni Eropa dapat dilihat dalam dua pengertian, yakni resistensi saat Inggris merasa harus melindungi kepentingan domestiknya dari dampak integrasi Eropa, dan pengaruh, yaitu bahwa Inggris juga merasa wajib dan berhak untuk ikut menentukan arah proses integrasi Eropa. Resistansi Inggris ini diwujudkan dengan upaya untuk menunda penerapan kebijakan-kebijakan Uni Eropa, seperti *Schengen Agreement* dan mata uang tunggal Euro.

Dalam upaya mendapat posisi yang dapat mempengaruhi arah proses integrasi, Inggris telah melakukan sebuah kesalahan strategis, yaitu bahwa Inggris tidak terlibat dari awal dalam pembentukan kerjasama Eropa. Uni Eropa telah lebih dulu mengembangkan institusi mapan yang jauh dari pengaruh Inggris¹⁹. Hal ini membuat Inggris kembali melirik pada hubungan trans-Atlantiknya dengan Amerika Serikat untuk mendapat posisi tawar lebih dalam forum Eropa. Secara umum, kebijakan

¹⁸ Margaret Thatcher, *The Downing Street Years* (London: HarperCollins 1993), hal. 516-532.

¹⁹ John Peterson, *op. cit.*, hal. 32.

luar negeri Inggris dipengaruhi oleh asumsi mengenai basis kemampuan ekonomi dan definisi diri yang keliru. Inggris masih merasa memiliki pengaruh sebagai kekuatan kolonial besar di dunia. Namun, secara riil Inggris tidak memiliki pilihan lain dalam keikutsertaannya di Uni Eropa. Dari pengalaman sejarah ini, Inggris memiliki kecenderungan pada bentuk Uni Eropa yang mendekati bentuk persemakmuran negara-negara berdaulat.

Nasionalisme Etnis Jerman

Jerman sebagai sebuah bangsa memiliki sejarah yang amat panjang. Sebagai sebuah kesatuan politik, sejarah Jerman dimulai pada 911²⁰ dalam bentuk sentra otonomi (*Regnum Teutonicum*) pasca runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476²¹. Kekaisaran (*reich*) Jerman secara resmi untuk pertama kalinya didirikan oleh Otto the Great pada tahun 962²². Selama seribu tahun, budaya,

bahasa, dan bangunan sosial dalam suku-suku yang berada dalam wilayah kekaisaran Jerman mengalami perkembangan menjadi lebih mapan. Dominasi bahasa menjadi penting dalam pembentukan identitas bersama, karena bahasa adalah faktor perekat dan perantara sosialisasi ide dalam masyarakat²³. Faktor bahasa kemudian menjadi lebih signifikan ketika pada abad ke-14 Marthin Luther menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Saat itu terjadi definisi ulang identitas nasional bangsa Jerman sebagai kaum Protestan. Di sini bangsa Jerman secara tegas memisahkan diri dari Holy Roman Empire, dan mengakibatkan pecahnya Perang Tiga Puluh Tahun yang diakhiri dengan perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Pada era ini, Jerman memiliki dua pusat kekuasaan, yaitu Prussia dan Austria.

Selanjutnya pada 1871, Otto von Bismarck berhasil menyatukan kembali Jerman yang terpecah-pecah akibat Perjanjian Westphalia. Bismarck

²⁰ PK = "Penanggalan Kristen", dan padanannya SPK= "Sebelum Penanggalan Kristen", Digunakan sebagai ganti kata 'Masehi', sesuai dengan keyakinan pribadi penulis tentang penggunaan predikat 'El Maseh' pada Iesu Nazareth.

²¹ Immanuel Geiss, *The Question of German Unification: 1806-1996* (London: Routledge, 1997), hal. 8.

²² Ekkart Zimmermann, "Germany", dalam Eatwell, *op. cit.* hal. 88.

²³ Dale R. Herspring, "Whither Eastern Europe?", dalam Wiarda, *op. cit.*, hal. 374. Dalam hal bahasa, Malcolm Anderson juga mengutip Karl Deutsch unruk mengutarakan pentingnya faktor kesatuan bahasa dalam pembentukan identitas kelompok: "*when people communicate within a group more easily than with individuals from other groups, then the main condition for the formation of national consciousness is laid.*", Malcolm Anderson, *op. cit.*, hal. 68.

memilih menggunakan konsep *kleindeutsch* (Jerman kecil) tanpa Austria. Pilihan ini didasarkan atas pertimbangan ketidaksesuaian antara sistem federalis kekaisaran Prussia dengan Austria yang lebih menyerupai konfederasi²⁴. Sebagai bandingan, konsep *groãdeutsch*, atau Jerman besar, memiliki tiga variasi: mengikutkan Austria dan Sudetenland yang penduduknya masih menggunakan bahasa Jerman, *maxi-groãdeutsch* dengan mengikutkan seluruh Austria dan sebagian Polandia, serta *super-groãdeutsch* dengan klaim atas tambahan wilayah dari wilayah-wilayah yang ditempati minoritas-minoritas Jerman di Eropa²⁵. Ekspansi teritorial Prancis di bawah Napoleon ke dalam wilayah Prussia pada tahun 1806-1813 membuat Prussia berusaha melindungi diri dari dampak-dampak Revolusi Prancis, justru dengan mengadopsi elemen-elemen Revolusi Prancis sendiri dan dengan modernisasi dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan industrialisasi²⁶.

Salah satu sumbangan besar sejarah Jerman pada konsep negara-bangsa adalah pandangan bahwa bangsa dalam pengertian hubungan pertalian darah (*sanguinis*) adalah

kelompok konstituen ideal bagi sebuah entitas politik. Pada *Battle of Valmy* 1793, teriakan perang tentara Prancis "*vive le France!*" telah memberi inspirasi pada Goethe bahwa semangat kebersamaan dapat mempersatukan dan memberi kekuatan yang dibutuhkan Jerman untuk bangkit melawan Prancis²⁷. Di bawah ancaman militer Napoleon dan epidemi semangat Revolusi yang melanda Eropa ini lahir para pemikir yang mengagungkan kebesaran Jerman sebagai sebuah bangsa, seperti Goethe, Arndt, Fichte, Herder dan Jahn. Johann Gottfried von Herder (1744-1803), yang dianggap sebagai peletak dasar bagi nasionalisme etnik Jerman²⁸.

Kekalahan Jerman dari ekspansi Napoleon dan basis filosofis pemikir Jerman menjadi dua faktor penting dalam bangkitnya solidaritas kebangsaan Jerman, bahwa 'bangsa Jerman' yang menggunakan bahasa Jerman seharusnya memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dua tahun Perang Pembebasan (1813-1815)

²⁴ Immanuel Geiss, *op cit.* hal. 41.

²⁵ *ibid.*, hal. 57-58.

²⁶ *ibid.*, hal. 32-33.

²⁷ Brian Jenkins, *ibid.*, dan juga Rodney Bruce Hall, *op cit.*, didownload dari <http://www.ciaonet.org/book/hall/hall02.html>, diakses tanggal 18 Februari 2006, pukul 21.30 WIB.

²⁸ Brian Jenkins, "The Europe of Nations and Regions" *op cit.* hal. 50. dan Stephen J. Lee, *op. cit.*, hal. 308.

mengembalikan kedaulatan penuh kedua Jerman (Prussia dan Austria)²⁹. Ini mengembalikan kepercayaan diri bangsa Jerman dan memberi jalan bagi Bismarck setengah abad kemudian untuk membangun Kekaisaran Kedua. Keruntuhan Kekaisaran Austro-Hungaria pada tahun 1918 menjadikan Jerman Prussia sebagai satu-satunya pusat bagi bangsa Jerman. Kekalahan Jerman (Prussia) pada Perang Dunia Pertama, menyebabkan Jerman kehilangan banyak wilayah dan kantong-kantong etnis Jerman. Sekali lagi bangsa Jerman harus terbagi-bagi dalam batas-batas teritori yang dibuat dalam perjanjian Versailles. Kekalahan perang, kehilangan teritori, kehilangan kekuatan angkatan bersenjata menyebabkan bangsa Jerman kembali merasa dipermalukan. Depresi ekonomi pada dekade tahun 30-an serta kekalahan pada perang menyebabkan ide nasionalisme tumbuh subur dalam masyarakat Jerman di masa *interbellum* ini.

Saat generasi muda Jerman yang merasakan kekalahan dan kesulitan ekonomi cukup dewasa, mereka dengan sukarela menerima ide kebesaran dan tradisi militerisme *teutonic* masa lalu Jerman dalam bentuk simbol seragam abu-abu dan

hijau zaitun militer Jerman. Pada titik ini, Jerman sebagai sebuah bangsa mulai bangkit dengan kesadaran solidaritas baru, yakni untuk mengembalikan tempat dan peran bangsa Jerman dalam politik Eropa. Nasionalisme Jerman ini dipersenjatai oleh semangat militerisme yang kuat sebagai alat pemersatu. Konsep *maxi-groãdeustch* kemudian dijadikan alasan klaim Hitler atas koridor Polandia dan atas semua wilayah yang memiliki komunitas Jerman. Tidak berhenti sampai disitu, Kekaisaran Ketiga Hitler juga melakukan pendudukan atas wilayah-wilayah yang lebih luas, terutama Prancis. Tindakan ini terlihat lebih sebagai pembuktian dan upaya pengembalian kepercayaan diri bangsa Jerman bahwa mereka sebenarnya memiliki kebesaran dan dapat menang melawan musuh-musuh lamanya. Saat Jerman mengalami kekalahan lagi pada Perang Dunia Kedua, pihak sekutu merasa perlu untuk mengantisipasi bangkitnya lagi Jerman sebagai sebuah kekuatan. Hal ini antara lain dilakukan dengan membagi Jerman menjadi dua, dan mencegahnya dari membangun kekuatan militer.

Sadar akan masa lalunya yang melibatkan tragedi *holocaust* pembantaian massal Yahudi pada masa Hitler, Jerman berusaha untuk membuktikan diri pada dunia bahwa

²⁹ Immanuel Geiss, *op cit.* hal. 34.

Jerman bukan lagi merupakan ancaman. Jerman mencoba menunjukkan komitmennya dalam berbagai kerjasama regional antara lain dengan menjadi pendukung utama integrasi Eropa baik dalam pendanaan, maupun keterlibatan secara politis dalam proses integrasi Eropa. Secara domestik, Jerman juga memecah kekuasaannya dalam sistem federasi dan memberi porsi kekuasaan lebih besar pada masing-masing *länder*. Namun setelah reunifikasi Jerman Barat dan Timur pada 1989, Jerman menghadapi masalah baru. Kesenjangan sosial-ekonomi antara penduduk eks Jerman Timur dengan tetangganya di bagian barat Jerman menyebabkan fungsi negara dalam penyediaan kesejahteraan terganggu. Bila di tingkat domestik Jerman harus mengatasi dampak buruk reunifikasi dan imigran terhadap integrasi sosial, di tingkat regional Jerman juga tetap harus mempertahankan perannya sebagai pendukung integrasi Uni Eropa. Di sini terlihat bahwa Jerman menghadapi proses *nation-building* di dua tingkat sekaligus, negara-bangsa dan Uni Eropa.

Uni Eropa dan Kelompok-kelompok Sub-Nasional

Uraian mengenai tiga negara besar di atas menggambarkan perjalanan sejarah yang dialami oleh ketiga

negara dan pengaruhnya pada sikap dan tindakan masing-masing institusi negara pada institusi Uni Eropa. Namun Uni Eropa tidak hanya menghadapi tantangan dan persaingan dengan negara-bangsa saja. Uni Eropa juga harus bersaing dengan kelompok-kelompok sub-nasional yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelompok sub-nasional yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok identitas etnis, agama, atau budaya yang selama ini berada di dalam bangun negara-bangsa. Identitas kelompok etnis bersifat *ascribed* dan tidak dapat diubah. Benua Eropa adalah sebuah mosaik yang penuh perpotongan garis wilayah etnis, agama, dan budaya. Sebagai obyek identifikasi, kelompok sub-nasional ini tentunya berada amat dekat dengan *core identity* dalam hirarki identitas individu³⁰.

³⁰ Satu hal yang perlu disadari oleh setiap pemerhati isu identitas, yakni bahwa perebutan tempat dalam hirarki identitas atau yang disebut oleh Amartya Sen sebagai *competing identities* (lihat Amartya Sen, *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007)), amat terkait dengan kebutuhan utama setiap individu untuk bertahan hidup. Tanpa melihat hal ini, kita akan tersesat dalam perdebatan tentang ketunggalan dan kemajemukan identitas individu, tanpa bisa melihat identitas itu sendiri sebagai suatu proses yang dinamis dalam rangka mempertahankan kehidupan seorang individu.

Mengatasi hal ini, Uni Eropa mengakomodasi dan mengadopsi keberadaan identitas sub nasional ini serta mengambil alih peran sebagai *parental figure* yang melindungi dan menjamin setiap individu untuk dapat hidup dengan tetap menjaga identitas sebagai bagian dari kelompok sub-nasional ini. Uni Eropa sudah berupaya memasukkan klausul ini pada Pasal 280 Traktat Konstitusi Eropa, dan dengan memberi kuota perwakilan di Parlemen Eropa bagi kelompok-kelompok sub-nasional ini. Adalah hal yang menarik ketika kelompok-kelompok ini justru melakukan identifikasi terhadap Uni Eropa dalam konteks membangun kekuatan tawar *vis-a-vis* terhadap negara-bangsa. Kasus-kasus seperti ini dapat dilihat dalam contoh Skotlandia, Basque, Wales, dan lain-lain. Dalam kasus-kasus tersebut, kelompok-kelompok sub-nasional menggunakan Uni Eropa sebagai alat resistensi politik. Namun kita juga bisa melihat bahwa kelompok-kelompok sub-nasional selama ini disatukan atau secara suka rela mempersatukan diri dalam kerangka negara-bangsa. Hal ini tidak lain karena ada persepsi bahwa negara-bangsa masih mampu memenuhi kepentingan kelompok sub-nasional akan kebutuhan material dan psikologis. Dalam kasus-kasus ini juga terlihat bahwa jika Uni Eropa

mampu menawarkan akomodasi pemenuhan kepentingan bagi individu melalui kelompok-kelompok sub-nasional dengan lebih baik, maka Uni Eropa akan lebih dapat menggantikan posisi negara-bangsa sebagai sumber identifikasi utama bagi masyarakat Eropa yang mendasarkan identitas personalnya kepada kelompok-kelompok sub-nasional ini.

Diskusi

Sebagai penutup, jika kita melihat keseluruhan proses integrasi Eropa sebagai suatu bentuk dari evolusi konsep kenegaraan, maka kita akan menemukan bahwa integrasi Eropa pada prakteknya masih terikat pada masalah klasik, yaitu untuk menemukan bentuk hubungan ideal antara negara dengan konstituennya. Dalam konteks pembahasan ini, hubungan antara Uni Eropa sebagai pelaku manajemen kekuasaan teritorial dengan subyek-subyek kekuasaannya dalam prakteknya belum menemukan bentuk formal selain bentuk yang selama ini digunakan oleh negara-bangsa, meskipun secara konseptual, banyak alternatif teori kontemporer yang lahir guna menjawab tuntutan perkembangan konsep kenegaraan sebagai konsekuensi regionalisme.

Dalam pembahasan mengenai ketiga negara besar Eropa dapat dilihat juga bahwa masing-masing

negara memiliki pengalaman historis yang berbeda dan kesemuanya merupakan anak kandung sejarah Eropa. Perbedaan pengalaman historis ini menyebabkan perbedaan pandangan mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara negara dengan konstituen dilakukan. Inggris dengan tradisi imperiumnya memperlakukan semua individu dan kelompok sub-nasional sebagai subyek kekuasaan di bawah mahkota kerajaan. Prancis dengan warisan semangat revolusinya masih berusaha mempersatukan semua subyek dalam sebuah kontrak antara negara dan warganegara yang menggunakan metode akulturasi dan asimilasi. Jerman memperlihatkan hubungan negara dan konstituennya dalam ide kebangsaan *sanguinis*.

Tiga pengalaman kenegaraan yang berbeda ini menjadikan masing-masing negara memiliki konsep sendiri mengenai *nation-state* dan *nation-building*, dan setidaknya tiga pengaruh dalam pembentukan model regional. Ketika bicara di tingkatan regional Eropa, kembali muncul pertanyaan mengenai konsep dan model apa yang seharusnya digunakan dalam rumusan hubungan antara Uni Eropa sebagai pelaku manajemen kekuasaan regional dengan subyek-subyeknya. Jika konsep negara-bangsa sendiri muncul sebagai tesis atas keruntuhan konsep imperium, maka integrasi Eropa mewakili peluang dalam proses evolusi konsep kenegaraan lebih lanjut. □



DAFTAR PUSTAKA

- Joe Andrew, Malcolm Crook dan Michael Waller (ed.), *Why Europe? Problems of Culture and Identity, Volume 1: Political and Historical Dimensions* (London : MacMillan Press Ltd., 2000)
- Norman Davies, *The Isles: A History, 2nd Edition* (London: Macmillan, 2000)
- Patrick Dunleavy dan Andrew Gamble et. al., *Developments in British Politics 5* (London: Macmillan, 1997)
- Roger Eatwell (ed), *European Political Culture: Conflict or Convergence?* (London: Routledge, 1997)
- Eric J. Evans, *Thatcher and Thatcherism*, (London: Routledge, 1997)
- Rodney Bruce Hall, *National Collective Identity: Social Constructs and International Systems*, (Columbia University Press 1999), didownload dari <http://www.ciaonet.org/book/hall/hall01.html>, diakses tanggal 18 Februari 2006, pukul 21.30 WIB.
- Brian Jenkins dan Spyros A. Sofos (ed.), *Nation & Identity in Contemporary Europe* (London: Routledge, 1996)
- Junaidi, "The Year is 2000: What is It to Be British?", *Wacana*, Vol. 4 No. 1, (April 2002)
- Stephen J. Lee, *Aspects of European History 1789 - 1980*, (London: Routledge, 1982)
- Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Singkat Jerman*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982)
- Richard Sakwa dan Anne Stevens, *Contemporary Europe* (New York: Palgrave Foundation, 2000)
- Amartya Sen, *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007)
- Anthony D. Smith, *National Identity* (Reno: University of Nevada Press, 1991)
- Margaret Thatcher, *The Downing Street Years* (London: HarperCollins 1993)
- Howard J. Wiarda (ed.), *European Politics in the Age of Globalization* (Orlando: Harcourt College Publishers, 2001)
- Ole Wæver dan Barry Buzan (et. al.), *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe* (London: Pinter Publishers, 1993)
- Teks Maastricht Treaty didownload dari <http://www.eurotreaties.com/maastrichttext/maastrichtec.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2004, pukul 03.15 WIB